

## Sambutan Menteri Keuangan dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi Pelaporan Keuangan

*Jakarta, 12 September 2014*  
*Dhanapala Kementerian Keuangan*

*Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Selamat Siang

Tadi saya sudah mengumumkan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam sambutan, saya sebutkan bahwa progress yang terjadi sangat signifikan. Tahun 2006 saat opini pertama kali diberikan, hanya 6 Kementerian/Lembaga yang dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sementara tahun 2013 sudah ada 65 Kementerian dan Lembaga.

Ini sesuatu hal yang harus kita syukuri karena dalam 10 tahun terakhir ada perbaikan kualitas pelaporan keuangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Untuk yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari tahun 2009 sampai 2013 turun dari 24 menjadi 18. Artinya beberapa yang mendapat opini WDP naik tingkat menjadi WTP, ini juga perbaikan. Sementara itu yang mendapat opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer tahun 2009 ada 7 dan sekarang hanya tinggal 3. Di tahun 2004 ada 84 Kementerian/ Lembaga. Semuanya mendapat opini *disclaimer*. Namun sekarang dari 86 Kementerian/Lembaga sebanyak 65 mendapat opini WTP. Artinya pelaporan keuangan semakin baik.

Mengapa ini penting? Ketika pemerintah mengeluarkan Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 dengan persetujuan DPR, sudah mulai ada upaya menyusun laporan akuntansi keuangan pemerintah. Kemudian dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Mengapa perlu? Karena jumlah nilai yang dikelola APBN menjadi semakin besar. Tahun 2009 APBN kita sebesar 848,8 triliun, tahun 2013 APBN 1.439 triliun, tahun 2014 APBN 1.635 triliun. Dengan angka APBN yang semakin besar maka angka pelaporan atau pertanggungjawaban laporan keuangan harus semakin baik.

Tetapi saya harus katakan ini belum sempurna. Kita harus tetap lanjutkan dan tingkatkan. Saya berharap pada pemerintah baru nanti laporan keuangan pemerintah semakin baik sehingga Insya Allah seluruh Kementerian/Lembaga mendapat opini WTP. Kita harus berpikir semakin lama semakin baik. Jika tahun 2004 tidak ada WTP, dalam 10 tahun bisa 65 yang WTP. Kami berharap pada pemerintahan baru situasinya akan meningkat dan menjadi lebih baik. Untuk itu kita harus bersama-sama mendukung pertanggungjawaban laporan keuangan agar menjadi semakin baik.

Hari ini kita menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional. Ada beberapa tujuan yang akan dicapai yaitu meningkatkan komitmen Kementerian/ Lembaga untuk menjaga kualitas pelaporan laporan keuangan dan akuntansi berbasis akrual. Ini juga harus menjadi hal baru, Jika selama ini menggunakan sistem cash basis, mulai tahun 2015 berbasis akrual. Perubahan dari *cash basis* ke *accrual basis* ini sesuatu yang sangat signifikan dan revolusioner. Untuk melakukan perubahan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Insya Allah tahun 2015 ini pemerintahan baru sudah akan menggunakan sistem pelaporan *accrual basis*.

Kemudian kita perlu membangun sinergi antara pejabat pengelola keuangan untuk pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Tadi kita memberikan apresiasi kepada menteri, gubernur, pimpinan lembaga atas prestasi mereka dalam memperoleh WTP. Nanti malam akan dilanjutkan dengan memberikan apresiasi kepada Bupati dan Walikota. Alhamdulillah 5 tahun terakhir Pak Wakil Presiden tidak pernah absen dalam membuka Rapat Kerja Nasional. Mudah-mudahan kedepannya semuanya bisa mendapat opini WTP.

Kalau mendapat opini WTP apakah pasti tidak korupsi? Laporan pertanggungjawaban disebut Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena dianggap pelaporan keuangan tersebut wajar. Bukan berarti semua proses disana tidak ada fraud, karena ini adalah hal yang berbeda. Kalau ingin tahu apakah ada kasus atau tidak harus dilakukan investigasi.

Ini adalah penilaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Bisa saja terjadi dari Laporan Keuangan yang WTP ada persoalan, tapi probabilitasnya bisa diminimalisir. Misalnya sebuah entitas mendapat WTP. Probabilitasnya untuk fraud lebih kecil, namun bukan berarti tidak ada sama sekali dibandingkan dengan yang mendapat opini disclaimer. Penyebab disclaimer kan bisa karena datanya tidak disajikan, tidak lengkap, dan inkonsestensi. Laporan keuangan ini lebih kepada catatan akuntansi. Harus dibedakan antara pelaporan akuntansi, audit, dengan investigasi kasus korupsi.

WTP tidak menjamin bebas KKN. Ini adalah pelaporan keuangan pemerintah, baik pusat dan daerah. Berbicara mengenai bagaimana laporan keuangan bisa disajikan secara wajar. Kalau disajikan secara tidak wajar tidak akan mendapat WTP. Harus dibedakan antara laporan keuangan dengan kemungkinan adanya *fraud*. *Fraud* bisa saja terjadi. Data yang tertulis bisa saja semuanya betul, namun dalam penyajian data tersebut ada proses lain.

Saya ambil contoh pada lelang. Bisa saja semua prosedur lelang dipenuhi. Namun kalau ada proses persekongkolan kan tidak muncul di laporan keuangan. Untuk mendapat WTP harus menyajikan laporan keuangan lengkap dan kalau ada yang aneh akan dicek kewajarannya. Meski probabilitas *fraud* pada laporan keuangan kecil, namun tidak ada jaminan tidak ada. Maka dari itu harus di-support hal-hal lain misalnya pengawasan oleh Inspektorat Jenderal kalau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Hal lainnya adalah menegnai dana desa. Kita melihat bahwa dana desa adalah sesuatu yang baru. Oleh karena itu, aparat desa harus dipersiapkan. Kan orang ribut kenapa di RAPBN 2015 dana desanya hanya 9,1triliun. Coba bayangkan kalau tiba-tiba dialokasikan dana per desa satu miliar sedangkan belum ada kesiapan. Apa yang terjadi? Saudara-saudara kita aparat desa bisa ditangkapin semua karena belum mampu mengelola dana yang begitu besar. Makanya dalam step awal hanya dialokasikan 9,1 triliun.

Adakah program-program pemerintah pusat selama ini yang berorientasi desa? Programnya sudah ada, bentuk pelaksanaannya juga ada, sehingga bisa segera dijalankan. Kalau nanti pemerintahan baru merasa desa sudah siap, sudah yakin pada kapasitas aparat desa, silahkan dinaikkan. Kita memberikan basis 9,1 triliun karena kita khawatir dengan kesiapannya. Kalau pemerintahan baru menganggap seluruh aparat desa sudah siap, pelaporan keuangan baik, dan tidak ada masalah dengan BPK, polisi dan KPK silahkan saja ditambah menjadi satu miliar.

*Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakaatuh.*